

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Siapa Charles Taylor

Charles Taylor lahir pada 5 November 1931. Ia berasal dari Montreal, Quebec, di Kanada. Ia adalah seorang filsuf yang telah mempelajari dan merenungkan berbagai topik, termasuk filsafat politik, filsafat ilmu sosial, dan sejarah filsafat. Taylor lulus dari Universitas McGill dengan gelar sarjana sejarah pada tahun 1952. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di bidang ekonomi, politik, dan filsafat di Oxford. Ia mempelajari filsafat untuk gelar doktornya pada tahun 1955 di bawah Isaiah Berlin dan G.E.M. Anscombe. Setelah studi doktoralnya, Taylor bekerja sebagai profesor teori politik dan sosial di Universitas Oxford. Selain itu, ia memiliki jabatan profesor dalam ilmu politik dan filsafat di Universitas McGill di Montreal, Kanada. Ia sekarang menjadi profesor emeritus dan telah pensiun. Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Kanada kepada warga negaranya, gelar kehormatan Order of Canada, dianugerahkan kepadanya pada tahun 1955. Taylor dianugerahi Penghargaan Kyoto untuk Filsafat dan Seni pada bulan Juni 2008. Penghargaan Kyoto, menurut banyak analis, adalah Penghargaan Nobel Jepang.¹²

¹² Reza A.A Wattimena, "MENUJU INDONESIA YANG BERMAKNA: Analisis Tekstual-Empiris Terhadap Pemikiran Charles Taylor Tentang Politik Pengakuan Dan Multikulturalisme, Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Studia Philosophica et Theologica* 11, no. 1 (2011): 3.

Charles Taylor, dikenal luas sebagai salah satu pemikir kontemporer berbahasa Inggris paling berpengaruh. Ia menjabat sebagai profesor di Montreal dan pernah mengajar di Universitas Oxford. Sekitar dua dekade setelah karya monumentalnya yang terdiri dari dua jilid, *Sumber Diri: Pembuatan Identitas Modern* (1989), memperoleh pengakuan luas, Taylor kembali menerbitkan sebuah karya besar lainnya berjudul *Zaman Sekuler*. Buku ini dipandang sangat penting, bahkan oleh sosiolog Robert N. Bellah disebut sebagai “salah satu buku terpenting dalam hidup saya.” Dalam *Zaman Sekuler*, Taylor menelusuri proses sekularisasi di dunia Barat, sekaligus menguraikan sejarah perjalanan spiritual dan intelektual masyarakat Barat selama lima abad terakhir.¹³

B. Pendekatan Sosio-Kultural Charles Taylor

Istilah *sosio-kultural* berasal dari dua kata, yakni *sosio* yang berarti sosial, yang merujuk pada aspek-aspek hubungan manusia dalam masyarakat, dan *kultural* yang berarti budaya, yakni sistem nilai, norma, dan simbol yang diwariskan dalam kehidupan kelompok. Dengan demikian, sosio-kultural merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi sosial dan kebudayaan yang memengaruhi pola kehidupan masyarakat.¹⁴

¹³ Magnis Suseno dan Franz, “FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA,” *Jurnal Diskursus* 12, no. 1 (2013): 125.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

Charles Taylor menekankan pentingnya pengakuan (*recognition*) terhadap identitas budaya sebagai fondasi pembentukan subjek yang bermartabat serta terciptanya relasi sosial yang adil dan harmonis. Taylor berargumen bahwa identitas manusia terbentuk secara dialogis, yakni melalui interaksi sosial dan pengakuan dari orang lain terhadap keberadaan serta nilai-nilai budaya yang mereka anut. Dalam karya monumentalnya *Multikulturalisme dan Politik Pengakuan* (1994), Taylor menyatakan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya bukan hanya sebuah tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan mendasar manusia. Ketika suatu kelompok atau individu tidak diakui secara kultural, mereka akan mengalami bentuk ketidakadilan sosial yang disebut sebagai "penyangkalan identitas", yang dalam jangka panjang dapat memicu ketegangan bahkan konflik sosial.¹⁵

Taylor juga banyak membahas bagaimana masyarakat modern, yang semakin beragam, membutuhkan mekanisme untuk mengakomodasi pluralisme budaya dan mengelola perbedaan ini dalam cara yang konstruktif. Dalam multikulturalisme, ia mengajukan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menghargai perbedaan budaya dan identitas, sambil tetap menjaga solidaritas sosial. Multikulturalisme bagi Taylor bukan hanya tentang toleransi atau penerimaan pasif, tetapi tentang pengakuan aktif terhadap nilai-nilai dan tradisi kelompok lain. Hal ini memungkinkan setiap

¹⁵ Charles Taylor, *Multikulturalisme Dan Politik Pengakuan* (Princeton University Press, 1994), 32–36.

kelompok untuk berkembang sesuai dengan nilai-nilai mereka, tanpa merasa terancam oleh homogenisasi budaya.¹⁶

Charles Taylor dalam *Pentingnya Dialog Antarbudaya*, mengungkapkan kegelisahannya terhadap kemunduran semangat multikulturalisme di tengah meningkatnya gelombang pengungsi dan kebangkitan politik sayap kanan yang menolak keberagaman. Ia menyoroti bahwa masyarakat cenderung melihat perbedaan budaya dalam kerangka permainan zero-sum, di mana keuntungan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dianggap sebagai kerugian bagi kelompok dominan. Taylor mengkritik asumsi-asumsi hierarkis historis yang menempatkan satu kelompok di atas yang lain seperti kulit putih atas kulit hitam, pria atas wanita, dan mayoritas atas minoritas sebagai hambatan besar bagi pertumbuhan etika masyarakat. Menurutnya, hanya melalui dialog antarbudaya yang dilandasi oleh pengakuan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan pihak lain, masyarakat dapat mengatasi kebencian dan ketakutan yang memecah belah. Ia menaruh harapan pada generasi muda yang lebih terbuka terhadap perbedaan karena pengalaman hidup dalam masyarakat majemuk, dan percaya bahwa rekonsiliasi sejati hanya dapat terjadi jika nilai-nilai etis ini menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat demokratis.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Charles Taylor, "Pentingnya Dialog Antarbudaya," *Jurnal Ethnicities* 25, no. 1 (2024): 4–5.

Taylor juga menekankan pentingnya dialog sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan menghargai perbedaan budaya dalam masyarakat multikultural. Dalam pandangannya, dialog yang terbuka antara individu dari berbagai latar belakang sosial dan budaya adalah cara terbaik untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dialog memungkinkan individu untuk mengungkapkan perspektif mereka, saling belajar, dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antar kelompok. Dialog ini menjadi sarana penting untuk menemukan kesamaan dalam perbedaan dan membangun ruang untuk pemahaman bersama, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan sosial yang lebih inklusif.¹⁸

Pandangan sosio-kultural Charles Taylor berfokus pada cara di mana identitas, nilai, dan makna hidup dibentuk dalam konteks sosial dan budaya, serta bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam karya-karyanya, Taylor mengkritik pandangan yang memisahkan individu dari konteks sosial dan budaya mereka, serta menekankan pentingnya pengakuan, dialog, dan pluralisme dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.¹⁹

¹⁸ Charles Taylor, *Zaman Sekuler* (Cambridge, Massachusetts, dan London, Inggris: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007).

¹⁹ Charles Taylor, *Sumber Diri: Pembuatan Identitas Modern* (London: Harvard University Press, 1989).

C. Konsep Perdamaian Menurut John Paul Lederach

John Paul Lederach mendefinisikan perdamaian sebagai suatu proses rekonsiliasi yang berkelanjutan, yang melibatkan upaya membangun kembali hubungan antar kelompok yang terpecah akibat konflik. Bagi Lederach, perdamaian bukan hanya berarti berakhirnya kekerasan, tetapi juga menciptakan struktur sosial baru yang berlandaskan keadilan, pengakuan, dan relasi yang sehat. Ia menolak pemahaman perdamaian yang sempit dan reaktif yang hanya fokus pada penanganan krisis jangka pendek dan sebagai gantinya mengusulkan model transformatif dan relasional yang mendorong perubahan dalam cara orang memandang diri mereka, pihak lain, serta masa lalu dan masa depan bersama.²⁰

Konsep perdamaian menurut John Paul Lederach berangkat dari pandangan bahwa perdamaian bukan semata-mata sebagai kondisi tanpa konflik, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan transformasi hubungan sosial dan pembangunan struktur yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif Lederach, perdamaian harus dibangun melalui sebuah pendekatan yang menyeluruh, di mana rekonsiliasi sosial merupakan inti dari setiap upaya resolusi konflik. Ia menekankan bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang memiliki potensi konstruktif bila dikelola dengan

²⁰ John Paul Lederach, *Membangun Perdamaian: Rekonsiliasi Berkelanjutan Dalam Masyarakat Yang Terpecah* (Washington, DC: Institut Perdamaian Amerika Serikat, 1997), 26.

tepat. Oleh karena itu, menurut Lederach, membangun perdamaian berarti menciptakan ruang sosial yang memungkinkan perjumpaan antarpihak yang berseteru, guna menciptakan pemahaman baru dan menyusun kembali hubungan yang terputus akibat konflik.²¹

Salah satu fondasi utama dalam kerangka berpikir Lederach adalah pentingnya sumber daya sosial ekonomi dan sosial budaya dalam proses pembangunan perdamaian. Ia menyatakan bahwa dukungan finansial memang penting, tetapi tidak cukup. Hal yang lebih esensial adalah bagaimana sumber daya tersebut dikaitkan dengan proses strategis jangka panjang untuk mengatasi akar konflik. Dalam hal ini, Lederach membagi sumber daya menjadi dua ranah besar: sosial ekonomi dan sosial budaya. Ranah sosial ekonomi merujuk pada kebutuhan untuk menyediakan dukungan struktural seperti dana, pelatihan, dan infrastruktur kelembagaan. Sementara itu, ranah sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik lokal yang telah lama berkembang dalam masyarakat, yang kerap kali justru menjadi sumber kekuatan untuk menciptakan perdamaian dari dalam.²²

Lederach juga memberikan penekanan khusus pada peran aktor tingkat menengah dalam pembangunan perdamaian. Aktor-aktor ini biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, agamawan, intelektual lokal, atau pemimpin komunitas yang memiliki kepercayaan dari masyarakat akar

²¹ Ibid., 92–93.

²² Ibid., 87–88.

rumpun namun juga mampu berinteraksi dengan elite politik atau lembaga formal. Karena posisi sosial mereka yang strategis, aktor tingkat menengah mampu membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru. Menurut Lederach, mereka memiliki fleksibilitas dan kapasitas yang unik untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta menjaga keberlangsungan proses perdamaian karena kedekatan mereka dengan realitas lokal.²³

D. Relasi Harmonis menurut Charles Taylor

Menurut Charles Taylor (1994), relasi harmonis hanya dapat tercipta ketika individu atau kelompok merasa diakui dalam identitas dan nilai-nilai mereka. Pengakuan menjadi elemen esensial dalam membangun hubungan sosial yang adil dan inklusif. Tanpa adanya pengakuan yang memadai, individu maupun kelompok rentan mengalami keterasingan atau marginalisasi, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Taylor menegaskan bahwa pengakuan tidak hanya merujuk pada pengakuan eksistensial terhadap individu, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kebudayaan, keyakinan, dan tradisi yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Ia menyatakan bahwa "Pengakuan bukan hanya

²³ Ibid., 94.

kesopanan yang kita berikan kepada sesama, ini adalah kebutuhan manusia yang vital”²⁴

Taylor berargumen bahwa identitas individu terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dalam komunitas sosial mereka. Dalam *Sumber Diri*, Taylor menjelaskan bahwa individu bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan dibentuk oleh konteks sosial dan budaya tempat mereka berada. Dalam konteks ini, relasi harmonis akan terjadi jika setiap individu merasa dihargai dan diterima oleh komunitas mereka, tanpa harus mengorbankan identitas mereka. Ketika identitas individu diakui oleh orang lain, baik dalam kelompok kecil maupun dalam masyarakat yang lebih besar, hal ini menciptakan ruang untuk harmoni sosial yang lebih kuat.²⁵

Dalam Zaman Sekuler, Taylor menekankan bahwa untuk menciptakan relasi harmonis, masyarakat harus mengedepankan dialog terbuka, saling memahami, dan menghargai perbedaan yang ada. Demokrasi, dalam pandangan Taylor, tidak hanya mengenai struktur politik, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap keragaman identitas yang ada dalam masyarakat. Dialog ini memungkinkan masyarakat untuk membangun konsensus tentang nilai-nilai bersama, sambil tetap menghargai perbedaan yang ada. Oleh karena itu, demokrasi yang sejati menurut Taylor adalah

²⁴ Ibid., 75.

²⁵ Charles Taylor, *Sumber Diri: Pembuatan Identitas Modern*.

ruang di mana pengakuan terhadap perbedaan menjadi prinsip dasar yang membimbing interaksi sosial.²⁶

Taylor juga mengakui bahwa dalam masyarakat yang pluralistik, perbedaan tidak dapat dihindari, tetapi harmoni sosial tercipta ketika setiap individu atau kelompok merasa bahwa mereka dapat mempertahankan identitas mereka sambil berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih besar. Hal ini memerlukan adanya pengaturan yang adil untuk memastikan bahwa setiap kelompok dapat hidup berdampingan tanpa merasa terancam atau diabaikan. Taylor berpendapat bahwa dalam masyarakat sekuler dan pluralistik, pengakuan terhadap perbedaan budaya, agama, dan nilai adalah kunci untuk membangun relasi harmonis yang stabil.²⁷

²⁶ Charles Taylor, *Zaman Sekuler*.

²⁷ Ibid.